

Integrasi Nalar Aqli dan Naqli dalam Pendidikan Islam Masa Abbasiyah: Relevansinya bagi Pendidikan Islam Kontemporer

Siti Rizqiyah Fitriyani¹, Bilqis Awaliyyah Wahyudi², Faiz Fikri Al Fahmi³, Nur Halimah⁴, Aimi Farina Sariff⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

Email: ¹2403020010@students.unis.ac.id, ²2403020053@students.unis.ac.id, ³ffikri@unis.ac.id,

⁴nurhalimah@unis.ac.id, ⁵aimifarina.sariff@qiu.edu.my

Received:

11 November 2024

Revised:

25 Desember 2025

Accepted:

12 Januari 2025

Published:

20 Februari 2025

ABSTRACT**Keywords:**

Abbasid Dynasty;
Islamic Education;
Bayt al-Hikmah;
Knowledge
Integration; History.

The Abbasid period is often regarded as the golden age of Islamic education, yet this characterization frequently separates political history, educational institutions, and intellectual traditions into distinct narratives. This study analyzes the relationship between naqli and 'aqli reasoning within the educational ecosystem of the Abbasid Dynasty and examines its relevance to contemporary Islamic education. Using a qualitative-historical approach based on a literature review, the study compares scholarly books, journal articles, and previous research on Abbasid educational institutions, the translation movement, mosques, madrasas, and Bayt al-Hikmah. The findings indicate that knowledge integration did not emerge from a single centralized curriculum but from an interconnected network of kuttab, mosque study circles, libraries, book markets, hospitals, observatories, madrasas, and Bayt al-Hikmah, supported by patronage, waqf, scholar mobility, and translation activities. Although Bayt al-Hikmah served as a vital intellectual infrastructure, equating it directly with a modern university obscures its distinctive historical functions. The Abbasid legacy remains relevant through its interdisciplinary orientation, culture of literacy and research, institutional diversity, sustainable funding, and scientific ethics. Its application in contemporary Islamic education, however, requires critical adaptation rather than a romantic reproduction of past models.

ABSTRAK**Kata Kunci:**

Dinasti Abbasiyah;
Pendidikan Islam;
Bayt al-Hikmah;
Integrasi Ilmu;
Sejarah

Masa Abbasiyah kerap diposisikan sebagai zaman keemasan pendidikan Islam, tetapi pelabelan tersebut sering memisahkan sejarah politik, lembaga pendidikan, dan tradisi intelektual menjadi uraian yang berdiri sendiri. Penelitian ini menganalisis hubungan nalar *naqli* dan *aqli* dalam ekologi pendidikan Dinasti Abbasiyah serta menilai relevansinya bagi pendidikan Islam kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-historis berbasis studi pustaka dengan membandingkan buku ilmiah, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu mengenai lembaga pendidikan Abbasiyah, gerakan penerjemahan, masjid, madrasah, dan *Bayt al-Hikmah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi ilmu tidak lahir dari satu kurikulum terpusat, melainkan melalui jaringan *kuttab*, halaqah masjid, perpustakaan, pasar buku, rumah sakit, observatorium, madrasah, dan *Bayt al-Hikmah* yang ditopang oleh patronase, wakaf, mobilitas ilmuwan, dan gerakan penerjemahan. *Bayt al-Hikmah* merupakan infrastruktur intelektual yang penting, tetapi penyamaannya secara langsung dengan universitas modern mengaburkan kekhasan fungsi historisnya. Warisan Abbasiyah tetap relevan melalui orientasi interdisipliner, budaya literasi dan riset, keragaman kelembagaan, pembiayaan berkelanjutan, serta etika keilmuan. Penerapannya dalam pendidikan Islam kontemporer memerlukan adaptasi kritis, bukan reproduksi romantik terhadap model pendidikan masa lalu.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) menempati posisi penting dalam historiografi pendidikan Islam karena pada periode inilah terjadi perluasan lembaga pendidikan, perkembangan tradisi literasi, pertumbuhan jaringan keilmuan, serta gerakan penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa. Baghdad berkembang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan berbagai tradisi intelektual yang mempertemukan warisan Arab-Islam, Persia, Yunani, India, dan budaya-budaya lain. Dukungan khalifah, ulama, pedagang, dan lembaga wakaf membentuk ekosistem keilmuan yang mendorong berkembangnya berbagai disiplin ilmu. Dalam lingkungan tersebut, ilmu-ilmu keislaman tumbuh berdampingan dengan filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sastra (Ismail, 2024; Makdisi, 1981; Shalaby, 2021).

Meskipun demikian, penyebutan Abbasiyah sebagai *zaman keemasan* pendidikan Islam perlu dipahami secara lebih kritis. Istilah tersebut memang menggambarkan tingginya aktivitas intelektual pada masa itu, tetapi berpotensi menyederhanakan dinamika sejarah yang berlangsung hampir lima abad. Periode Abbasiyah mengalami perubahan politik, sosial, dan kelembagaan yang terus berkembang. Kemajuan ilmu pengetahuan juga tidak selalu berjalan seiring dengan stabilitas politik kekhalifahan. Ketika otoritas pusat melemah, aktivitas ilmiah tetap berlangsung melalui kota-kota, patron lokal, madrasah, perpustakaan, serta jaringan guru dan murid. Oleh sebab itu, pendidikan pada masa Abbasiyah lebih tepat dipahami sebagai ekologi pengetahuan yang bersifat majemuk daripada sebagai satu sistem pendidikan yang sepenuhnya terpusat.

Persoalan lain muncul ketika perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah dipetakan secara dikotomis menjadi *ilmu agama* dan *ilmu umum*. Pembagian tersebut berguna sebagai kategori analitis, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan praktik pendidikan pada masa itu. Pengajaran Al-Qur'an, hadis, fikih, bahasa, logika, matematika, astronomi, hingga kedokteran berlangsung pada lembaga yang berbeda dengan tingkat keterhubungan yang berubah sesuai tempat, periode, otoritas guru, dan dukungan patronase. Dalam konteks tersebut, nalar *naqli* yang bertumpu pada wahyu dan transmisi keilmuan tidak selalu berjalan terpisah dari nalar *aqli* yang berkembang melalui argumentasi rasional, observasi, dan demonstrasi. Hubungan keduanya lebih banyak dibentuk melalui negosiasi intelektual, pembagian fungsi kelembagaan, serta perdebatan mengenai tujuan dan kedudukan ilmu (Al-Attas, 2023; Makrifat et al., 2026; Nasr, 2006; Putra et al., 2025)

Penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan yang beragam. Kajian pertama lebih banyak membahas sejarah pendidikan Abbasiyah dari aspek periodisasi, tujuan pendidikan, kurikulum, dan perkembangan madrasah (Nurhaliza et al., 2025; Wasito, 2022). Kajian kedua berfokus pada Bayt al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan, perpustakaan, patronase ilmiah, dan perkembangan ilmu pengetahuan (Kamalia & Imawan, 2025; Mathar, 2024). Sementara itu, kelompok kajian ketiga mengkaji berbagai lembaga pendidikan seperti masjid, *kuttab*, perpustakaan, wakaf, dan madrasah sebagai ruang produksi sekaligus transmisi ilmu (Badriyah, 2025; Hasan et al., 2025; Komariah & Baskara, 2025). Berbagai penelitian tersebut memberikan gambaran yang kaya mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Namun, hubungan antara kelembagaan pendidikan, integrasi nalar *naqli* dan *aqli*, serta mekanisme yang memungkinkan keduanya berkembang dalam satu ekosistem keilmuan masih belum banyak dibahas secara utuh.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana jaringan lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah membentuk hubungan antara

ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu rasional-empiris? Kedua, prinsip-prinsip apa yang masih relevan untuk pengembangan pendidikan Islam kontemporer, serta batas-batas historis apa yang perlu diperhatikan dalam mengadaptasinya? Penelitian ini berargumen bahwa integrasi nalar *naqli* dan *aqli* tidak dibangun oleh satu lembaga ataupun kurikulum yang bersifat tunggal. Integrasi tersebut lahir melalui hubungan antarlembaga, dukungan patronase dan wakaf, gerakan penerjemahan, mobilitas ilmuwan, budaya literasi, serta etika pencarian ilmu. Dengan pendekatan tersebut, warisan pendidikan Abbasiyah dipahami sebagai sumber inspirasi yang memerlukan pembacaan kritis sehingga terhindar dari romantisasi sejarah tanpa kehilangan nilai analitisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka historis (*historical library research*). Sumber data meliputi monograf sejarah pendidikan Islam, artikel jurnal, disertasi, dan karya konseptual yang membahas Dinasti Abbasiyah, lembaga pendidikan, *Bayt al-Hikmah*, gerakan penerjemahan, pembiayaan pendidikan, serta hubungan antara ilmu keagamaan dan ilmu rasional (Ahmed, 2024; Baxter & Jack, 2008; Creswell & Poth, 2023). Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi terhadap fokus penelitian, kejelasan informasi bibliografis, serta kontribusinya dalam menjelaskan aspek kelembagaan dan epistemologi pendidikan Abbasiyah.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan (Farquhar et al., 2020; Kozinets & Gretzel, 2025; Miles et al., 2018). Tahap pertama berupa identifikasi dan pemetaan informasi historis mengenai kondisi politik, bentuk lembaga pendidikan, aktor yang terlibat, sumber pembiayaan, serta perkembangan berbagai bidang ilmu. Tahap kedua mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, meliputi ekologi pendidikan, fungsi *Bayt al-Hikmah*, hubungan nalar *naqli* dan *aqli*, serta relevansinya bagi pendidikan Islam kontemporer. Tahap ketiga membandingkan berbagai temuan dari sumber yang berbeda untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterkaitannya, kemudian menafsirkannya secara historis. Dalam proses ini, setiap klaim yang menyamakan institusi pendidikan Abbasiyah dengan lembaga pendidikan modern dikaji secara kritis guna menghindari anakronisme.

Penelitian ini bersifat interpretatif sehingga tidak dimaksudkan sebagai tinjauan sistematis (*systematic review*) yang menghimpun seluruh publikasi mengenai pendidikan Abbasiyah. Penggunaan sumber-sumber sekunder juga membatasi penelitian dalam menyelesaikan berbagai perdebatan historis, seperti waktu pendirian, struktur organisasi, maupun skala aktivitas beberapa lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kesimpulan penelitian diarahkan pada penjelasan mengenai pola hubungan kelembagaan, dinamika epistemologis, dan integrasi nalar *naqli* dan *aqli* sebagaimana tercermin dalam berbagai sumber yang dianalisis, bukan pada rekonstruksi historis yang bersifat final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan pada masa Abbasiyah tidak dapat dijelaskan hanya melalui kemajuan lembaga pendidikan atau lahirnya tokoh-tokoh besar. Integrasi nalar *naqli* dan *aqli* terbentuk melalui hubungan yang saling mendukung antara dinamika politik, keragaman lembaga pendidikan, gerakan penerjemahan, budaya literasi, serta jaringan ilmuwan yang berkembang selama periode Abbasiyah. Untuk memperjelas hubungan tersebut, pembahasan disusun ke dalam beberapa tema yang saling berkaitan.

Konteks Politik dan Pembentukan Ekologi Pengetahuan

Berdirinya Dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad ke-8 membawa perubahan penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Perpindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad bukan hanya menggeser pusat kekuasaan politik, tetapi juga mengubah arah perkembangan ilmu pengetahuan. Baghdad tumbuh sebagai kota yang mempertemukan berbagai tradisi intelektual dari Arab, Persia, Yunani, India, dan wilayah lain melalui aktivitas perdagangan, pemerintahan, maupun pertukaran budaya. Kondisi tersebut menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat produksi dan penyebaran ilmu pengetahuan di dunia Islam (Shalaby, 2021).

Perubahan politik tersebut memperluas keterlibatan berbagai kelompok dalam kehidupan intelektual. Selain ulama, birokrat, dan keluarga istana, masyarakat Persia, para penerjemah, dokter, pedagang buku, serta komunitas ilmiah dari berbagai latar belakang turut mengambil bagian dalam perkembangan pendidikan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa aktivitas keilmuan Abbasiyah berkembang melalui ruang sosial yang terbuka terhadap perjumpaan berbagai tradisi pengetahuan.

Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah sering dikaitkan dengan kebijakan para khalifah, terutama al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru karena ketiga khalifah memang memberikan dukungan yang besar terhadap kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu. Akan tetapi, perkembangan intelektual Abbasiyah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan politik. Dukungan keluarga-keluarga elite, pejabat pemerintahan, ulama, dokter istana, pedagang, dan lembaga wakaf ikut menjaga keberlangsungan kegiatan belajar, penyediaan manuskrip, hingga pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan Abbasiyah berkembang melalui perpaduan antara kekuatan politik, ekonomi, dan masyarakat, bukan semata-mata karena negara menjadi penyelenggara tunggal pendidikan (Mathar, 2024; Nurhaliza et al., 2025).

Hubungan tersebut semakin terlihat ketika kondisi politik Abbasiyah mulai mengalami perubahan. Dominasi militer Turki, munculnya kekuasaan Buwaih dan Seljuk, maupun melemahnya otoritas khalifah tidak serta-merta menghentikan aktivitas ilmiah. Berbagai pusat pembelajaran tetap berkembang di luar lingkungan istana. Madrasah Nizamiyah, misalnya, berdiri pada masa dominasi Seljuk, tetapi tetap menjadi bagian dari tradisi intelektual yang berkembang dalam dunia Abbasiyah. Fakta ini menunjukkan bahwa penyebaran ilmu berlangsung melalui jaringan lembaga, guru, dan komunitas ilmiah yang tidak sepenuhnya bergantung pada stabilitas pemerintahan pusat (Kamalia & Imawan, 2025; Mathar, 2024).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Abbasiyah lebih tepat dipahami sebagai sebuah ekologi pengetahuan. Perkembangannya ditopang oleh hubungan yang erat antara penguasa, lembaga pendidikan, ulama, masyarakat, tradisi literasi, pasar buku, serta mobilitas ilmuwan yang menghubungkan berbagai kota. Dalam ekosistem seperti ini, stabilitas politik memang memberi ruang bagi berkembangnya ilmu pengetahuan, tetapi keberlanjutannya lebih banyak ditentukan oleh kemampuan masyarakat membangun, memelihara, dan mewariskan tradisi keilmuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Arsitektur Lembaga Pendidikan Abbasiyah

Perkembangan pendidikan pada masa Abbasiyah tidak ditopang oleh satu jenis lembaga, melainkan oleh jaringan institusi yang menjalankan fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Keragaman ini membentuk ekologi pendidikan yang memungkinkan ilmu berkembang melalui berbagai ruang belajar, baik yang bersifat formal maupun nonformal.

Berbeda dengan sistem pendidikan modern yang mengenal jenjang dan administrasi terpusat, pendidikan Abbasiyah berlangsung melalui beragam lembaga dengan tingkat kelembagaan yang berbeda. *Kuttab* atau *maktab* menjadi tempat pendidikan dasar yang mengajarkan membaca, menulis, Al-Qur'an, bahasa Arab, dan pada beberapa wilayah juga aritmetika. Setelah itu, masjid dan halaqah berkembang sebagai pusat pembelajaran hadis, fikih, tafsir, bahasa, sekaligus ruang diskusi ilmiah. Di luar kedua lembaga tersebut, rumah para ulama, perpustakaan, toko buku, *khan*, dan *ribath* juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar yang lebih fleksibel (Nurhaliza et al., 2025; Wasito, 2022).

Keragaman lembaga tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Abbasiyah tidak dibangun melalui satu jalur yang seragam. Setiap institusi memiliki fungsi sesuai kebutuhan masyarakat dan bidang ilmu yang berkembang. Hubungan antarlembaga inilah yang memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas, baik dalam ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu rasional.

Keberadaan rumah sakit (*bimaristan*) dan observatorium memperlihatkan bahwa proses pendidikan tidak berhenti pada penguasaan teori. Dalam bidang kedokteran, peserta didik mempelajari berbagai karya ilmiah sekaligus melakukan pengamatan terhadap pasien dan praktik klinis bersama para tabib. Demikian pula dalam astronomi dan matematika, pembelajaran berkembang melalui observasi, pengukuran, serta penyelesaian persoalan praktis, seperti penentuan waktu salat, penyusunan kalender, dan navigasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengalaman empiris menjadi bagian penting dalam proses pembentukan pengetahuan.

Pada saat yang sama, madrasah memperkuat pelembagaan pendidikan tingkat lanjut, terutama dalam bidang fikih, teologi, bahasa, dan pembentukan otoritas ulama. Dukungan wakaf memungkinkan tersedianya ruang belajar, asrama, gaji pengajar, serta bantuan bagi para pelajar. Meskipun demikian, madrasah tidak menggantikan fungsi masjid, perpustakaan, ataupun jaringan pendidikan privat. Seluruh lembaga tersebut tetap berkembang secara berdampingan dan membentuk sistem pendidikan yang saling menopang.

Tabel 1. Ekologi Lembaga Pendidikan pada Masa Abbasiyah

Lembaga	Fungsi Historis Utama	Corak Pengetahuan dan Makna Analitis
<i>Kuttab/Maktab</i>	Literasi dasar, membaca, menulis, Al-Qur'an, bahasa, dan aritmetika dasar.	Memadukan pembentukan religius dengan kemampuan literasi dasar sebagai fondasi pembelajaran lanjutan.
Masjid dan <i>halaqah</i>	Pengajaran hadis, fikih, tafsir, bahasa, debat, dan transmisi otoritas guru.	Menjadi pusat utama pengembangan ilmu <i>naqli</i> sekaligus ruang diskusi argumentatif.
Perpustakaan, toko buku, dan rumah ulama	Penyimpanan, penyalinan, penyebaran manuskrip, diskusi, dan pembelajaran privat.	Menghubungkan berbagai disiplin melalui sirkulasi teks dan jaringan ilmuwan.
<i>Bayt al-Hikmah</i>	Koleksi manuskrip, penerjemahan, patronase, kajian ilmiah, dan penyalinan naskah.	Menjadi simpul pertukaran bahasa sekaligus pengembangan ilmu rasional dan empiris.
Rumah sakit dan observatorium	Pelatihan profesional, observasi, pencatatan, penelitian, dan penerapan ilmu.	Menguatkan tradisi empiris melalui hubungan antara teori dan praktik.

Madrasah, <i>khan</i> , dan <i>ribath</i>	Pendidikan lanjutan, asrama, pembiayaan wakaf, dan pembentukan ulama.	Melembagakan pendidikan keagamaan tanpa menghilangkan fungsi lembaga lain.
---	---	--

Sumber: Diolah penulis

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tidak ada satu lembaga yang menguasai seluruh proses pendidikan. Setiap institusi menjalankan fungsi yang berbeda sesuai karakter ilmu yang dikembangkan. *Kuttab* membangun kemampuan literasi dasar, masjid menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keagamaan, perpustakaan memperluas akses terhadap berbagai manuskrip, sedangkan rumah sakit dan observatorium menyediakan ruang bagi berkembangnya metode empiris. Dengan demikian, integrasi ilmu tidak lahir karena seluruh disiplin diajarkan dalam satu lembaga, tetapi karena terdapat hubungan yang memungkinkan peserta didik dan para ilmuwan berpindah dari satu ruang belajar ke ruang belajar lainnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Abbasiyah berkembang sebagai sebuah jaringan, bukan sebagai sistem yang sepenuhnya terpusat. Pergerakan guru, murid, manuskrip, dan gagasan menjadi unsur yang menghubungkan berbagai lembaga tersebut. Mobilitas inilah yang memungkinkan ilmu agama, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi saling berinteraksi tanpa kehilangan karakter masing-masing.

Otoritas keilmuan juga tidak semata-mata ditentukan oleh status kelembagaan. Reputasi seorang guru, kesinambungan sanad keilmuan, kemampuan berdialog, dan pengakuan komunitas ilmiah sering kali lebih menentukan daripada besarnya lembaga tempat ia mengajar. Karena itu, halaqah yang berlangsung di masjid atau di rumah seorang ulama dapat memiliki pengaruh yang sama besar, bahkan melebihi, lembaga yang memperoleh dukungan langsung dari penguasa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendidikan Abbasiyah bertumpu pada kekuatan relasi intelektual sekaligus keberlangsungan tradisi keilmuan yang hidup di tengah masyarakat.

Bayt al-Hikmah dan Gerakan Penerjemahan

Perkembangan pendidikan Abbasiyah tidak hanya ditopang oleh keberadaan lembaga-lembaga pendidikan, tetapi juga oleh budaya literasi yang mendorong lahirnya tradisi ilmiah. Dalam konteks ini, *Bayt al-Hikmah* menjadi salah satu simpul penting yang mempertemukan kegiatan penerjemahan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kerja sama antarkomunitas intelektual.

Bayt al-Hikmah merupakan institusi yang paling sering dikaitkan dengan kemajuan intelektual Abbasiyah. Sejumlah penelitian menelusuri asal-usulnya dari perpustakaan istana yang mulai berkembang sejak masa al-Mansur dan Harun al-Rasyid, kemudian memperoleh dukungan yang lebih besar pada masa al-Ma'mun. Perbedaan pendapat mengenai waktu pendiriannya menunjukkan bahwa *Bayt al-Hikmah* lebih tepat dipahami sebagai lembaga yang berkembang secara bertahap daripada sebagai institusi yang lahir dalam satu peristiwa historis tertentu.

Peran *Bayt al-Hikmah* juga jauh melampaui fungsi perpustakaan. Lembaga ini menjadi tempat pengumpulan manuskrip, penerjemahan, penyalinan naskah, diskusi ilmiah, serta pemberian dukungan kepada para ilmuwan. Kegiatan penerjemahan tidak sekadar memindahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi menuntut penguasaan bahasa sumber, pemahaman terhadap istilah ilmiah, serta kemampuan menyesuaikan konsep dengan tradisi keilmuan Islam. Melalui proses tersebut, penerjemahan menjadi bagian dari produksi pengetahuan karena

melahirkan istilah, kategori analitis, dan cara berpikir baru yang memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan (Mathar, 2024; Wasito, 2022).

Masuknya karya-karya dari tradisi Yunani, Persia, India, dan Siria semakin memperluas cakrawala intelektual masyarakat Abbasiyah. Berbagai disiplin seperti matematika, astronomi, kedokteran, logika, dan filsafat tidak diterima secara pasif, melainkan dipelajari, dikritisi, dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat Muslim. Dari proses tersebut lahir ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina yang berhasil mengembangkan pemikiran rasional sekaligus tetap menempatkan dimensi etika dan nilai-nilai keagamaan dalam karya-karya mereka. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah merupakan hasil interaksi antara gerakan penerjemahan, patronase, tradisi literasi, dan jaringan pembelajaran yang berkembang di berbagai wilayah.

Meskipun sering disebut sebagai salah satu lembaga pendidikan paling maju pada zamannya, *Bayt al-Hikmah* tidak dapat disamakan secara langsung dengan universitas modern. Lembaga ini memang memiliki fungsi yang menyerupai perpustakaan, pusat penelitian, dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, *Bayt al-Hikmah* belum mengenal struktur fakultas, kurikulum yang baku, sistem penerimaan mahasiswa, maupun pemberian gelar akademik sebagaimana berlaku dalam perguruan tinggi saat ini. Oleh karena itu, penyebutan *Bayt al-Hikmah* sebagai "universitas pertama" perlu dipahami secara hati-hati agar tidak mengabaikan konteks sejarah dan karakter kelembagaannya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi utama *Bayt al-Hikmah* bukan terletak pada statusnya sebagai lembaga pendidikan formal, melainkan pada kemampuannya menghubungkan berbagai unsur yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Dukungan pemerintah, koleksi manuskrip, para penerjemah, penyalin naskah, dan komunitas ilmuwan bertemu dalam satu ruang yang memungkinkan lahirnya pertukaran gagasan secara intensif. Namun demikian, perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah tidak hanya bergantung pada *Bayt al-Hikmah*. Lembaga ini merupakan salah satu simpul dalam jaringan intelektual yang lebih luas, yang juga mencakup masjid, madrasah, perpustakaan pribadi, rumah sakit, observatorium, serta toko buku. Dengan demikian, kemajuan ilmu pengetahuan lebih tepat dipahami sebagai hasil kolaborasi antarlembaga daripada pencapaian satu institusi semata.

Gerakan penerjemahan juga berkembang karena adanya lingkungan sosial yang terbuka terhadap perjumpaan berbagai tradisi intelektual. Para penerjemah, dokter, penyalin naskah, dan ilmuwan berasal dari latar belakang bahasa, agama, dan budaya yang beragam. Pertukaran pengetahuan tersebut memungkinkan berkembangnya kerja ilmiah yang melampaui batas identitas kelompok. Safei (2021) menempatkan toleransi serta interaksi lintas budaya dan agama sebagai salah satu faktor yang turut memperkuat perkembangan peradaban Abbasiyah, terutama melalui aktivitas intelektual yang berkaitan dengan *Bayt al-Hikmah*. Dalam perspektif ini, lembaga tersebut dapat dipahami sebagai ruang dialog yang mempertemukan berbagai tradisi pengetahuan.

Keterbukaan tersebut memiliki implikasi penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak dinilai semata-mata berdasarkan asal-usul pembawanya, tetapi juga melalui kualitas argumentasi, manfaat, dan peluang pengembangannya. Interaksi lintas komunitas melahirkan istilah-istilah ilmiah baru, memperkaya tradisi penulisan, serta membuka ruang bagi berkembangnya gagasan yang sebelumnya lahir dalam lingkungan budaya yang berbeda. Temuan Kamalia & Imawan (2025) memperlihatkan bahwa kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah ditopang oleh kemampuan membangun kerja sama intelektual di tengah

keberagaman. Dengan demikian, toleransi tidak hanya menjadi nilai sosial, tetapi juga berfungsi sebagai prasyarat berkembangnya budaya ilmiah.

Meskipun demikian, keterbukaan tersebut tidak berarti masyarakat Abbasiyah sepenuhnya bebas dari persaingan politik, hierarki sosial, maupun perbedaan keagamaan. Kedudukan sosial, hubungan dengan patron, serta perubahan kebijakan penguasa tetap memengaruhi kesempatan seorang ilmuwan memperoleh dukungan dan menyebarkan gagasannya. Karena itu, toleransi lebih tepat dipahami sebagai ruang yang memungkinkan kolaborasi intelektual daripada sebagai gambaran masyarakat yang sepenuhnya setara. Pembacaan seperti ini membantu menghindari romantisasi sejarah sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah berlangsung dalam dinamika sosial dan politik yang kompleks.

Integrasi Nalar *Naqli* dan *Aqli*

Pembahasan mengenai lembaga pendidikan dan gerakan penerjemahan memperlihatkan bahwa perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah. Berbagai disiplin saling berinteraksi melalui jaringan ilmuwan, tradisi literasi, dan praktik pembelajaran. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan antara nalar *naqli* dan *aqli* dalam tradisi pendidikan Islam.

Nalar *naqli* berakar pada Al-Qur'an, hadis, serta tradisi keilmuan Islam yang berkembang melalui proses transmisi dan otoritas keilmuan. Sementara itu, nalar *aqli* bertumpu pada kemampuan akal dalam menyusun argumentasi, melakukan pengamatan, serta menjelaskan berbagai fenomena secara rasional. Pada masa Abbasiyah, kedua corak penalaran tersebut tidak selalu ditempatkan dalam posisi yang saling berhadapan. Sebaliknya, keduanya berkembang melalui hubungan yang dinamis sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu, tradisi keilmuan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hubungan tersebut tampak dalam perkembangan berbagai disiplin ilmu. Tafsir, hadis, dan fikih berkembang bersamaan dengan kemajuan matematika, astronomi, kedokteran, serta filsafat. Ilmu bahasa dan logika membantu memperkuat penafsiran terhadap sumber-sumber keagamaan, sedangkan matematika dan astronomi berkontribusi pada penentuan waktu ibadah, arah kiblat, dan pembagian waris. Dalam bidang kedokteran, penguasaan ilmu dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kehidupan manusia. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa ilmu-ilmu agama dan ilmu rasional berkembang melalui fungsi yang saling melengkapi, bukan melalui pemisahan yang kaku.

Meskipun demikian, hubungan antara nalar *naqli* dan *aqli* tidak berarti seluruh disiplin ilmu melebur menjadi satu pendekatan yang seragam. Integrasi yang berkembang pada masa Abbasiyah lebih tepat dipahami sebagai integrasi fungsional dan metodologis. Secara fungsional, berbagai disiplin digunakan secara bersama untuk menjawab persoalan keagamaan, sosial, maupun pemerintahan. Secara metodologis, para ilmuwan memadukan pembacaan teks, argumentasi rasional, observasi, dan pengalaman sesuai dengan karakter persoalan yang sedang dikaji. Al-Farabi, misalnya, memandang pendidikan sebagai sarana pembentukan kebajikan individu sekaligus keteraturan masyarakat, sedangkan tradisi pendidikan Islam menempatkan pencarian ilmu sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan tanggung jawab moral (Zuhriyah et al., 2024).

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa integrasi ilmu bukan berarti menghilangkan perbedaan cara memperoleh pengetahuan. Perdebatan mengenai filsafat, logika, teologi, dan penafsiran agama tetap menjadi bagian dari kehidupan intelektual Abbasiyah. Diskusi mengenai

batas otoritas wahyu, kedudukan akal, maupun tujuan pendidikan menunjukkan bahwa tradisi ilmiah berkembang melalui proses kritik dan dialog yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, nalar *aqli* tidak berfungsi sebagai pengganti wahyu, sementara nalar *naqli* juga tidak menjadi dasar untuk menolak seluruh bentuk penalaran rasional. Keduanya saling menguji melalui argumentasi, klarifikasi konsep, dan penentuan batas-batas normatif.

Integrasi tersebut juga tidak diwujudkan melalui kurikulum yang berlaku sama di seluruh lembaga pendidikan. Bidang ilmu yang dipelajari sangat bergantung pada karakter institusi dan otoritas guru. Masjid dan madrasah lebih banyak mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan, sedangkan rumah sakit, observatorium, dan lingkungan penerjemahan menjadi ruang berkembangnya ilmu rasional dan empiris. Karena itu, integrasi lebih banyak terjadi melalui perpindahan peserta didik, sirkulasi manuskrip, kerja sama antarsarjana, serta penggunaan berbagai metode dalam menyelesaikan persoalan yang sama. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesatuan ilmu pada masa Abbasiyah dibangun melalui hubungan antarlembaga, bukan melalui penyatuan seluruh disiplin ke dalam satu ruang pembelajaran.

Budaya literasi menjadi unsur penting yang menjaga hubungan tersebut. Tradisi penyalinan naskah, penerjemahan, penyusunan syarah, perdebatan ilmiah, dan pengajaran memungkinkan gagasan terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui proses itu, teks tidak hanya diwariskan, tetapi juga dikaji kembali, dikritisi, dan disempurnakan sesuai perkembangan pengetahuan. Dengan demikian, integrasi nalar *naqli* dan *aqli* memerlukan infrastruktur literasi yang memungkinkan berlangsungnya dialog ilmiah secara berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan normatif mengenai kesatuan ilmu.

Hubungan antara wahyu dan akal juga berangkat dari pandangan mengenai manusia sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan. Akal memungkinkan manusia mengamati, membandingkan, serta menyusun penjelasan terhadap berbagai fenomena yang dihadapi. Kemampuan tersebut berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab memelihara dan memakmurkan kehidupan. Sya'adah et al. (2025)) menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas tersebut memerlukan pengetahuan yang memadai. Dalam kerangka ini, Al-Qur'an memberikan orientasi nilai, sedangkan filsafat dan penalaran rasional membantu manusia memahami realitas secara lebih mendalam. Pencarian ilmu karena itu memperoleh landasan religius sekaligus rasional.

Posisi akal dalam tradisi keilmuan Abbasiyah juga tidak dapat dipahami hanya sebagai alat untuk membenarkan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akal berfungsi memahami hubungan sebab-akibat, menyusun argumentasi, serta mengembangkan pengetahuan melalui pengamatan dan analisis. Di sisi lain, keterbatasan akal menjadikan wahyu tetap memiliki kedudukan sebagai sumber orientasi moral. Assayyidi & Farhan (2024) memandang bahwa akal dan wahyu merupakan dua sumber pengetahuan yang saling melengkapi dalam membantu manusia menemukan kebenaran dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Hubungan tersebut tetap mempertahankan perbedaan metode masing-masing. Teks keagamaan memerlukan proses penafsiran, penalaran rasional menuntut konsistensi logis, sedangkan pengetahuan mengenai alam harus dibangun melalui observasi dan pengalaman empiris.

Berdasarkan temuan tersebut, integrasi nalar *naqli* dan *aqli* pada masa Abbasiyah lebih tepat dipahami sebagai koordinasi antarsumber pengetahuan daripada penyatuan seluruh metode keilmuan. Wahyu memberikan orientasi mengenai tujuan dan tanggung jawab moral, sedangkan akal dan pengalaman empiris membantu menjelaskan cara kerja realitas serta menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan. Pemahaman seperti ini menjelaskan mengapa tradisi intelektual Abbasiyah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan

tanpa menghilangkan ruang bagi kritik, perdebatan, dan perbedaan pendapat. Integrasi tidak menghapus keragaman metode, tetapi membangun hubungan yang produktif di antara berbagai cara memperoleh pengetahuan.

Relevansi bagi Pendidikan Islam Kontemporer

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pendidikan pada masa Abbasiyah tidak dapat dipindahkan secara langsung ke dalam sistem pendidikan modern. Perbedaan konteks sosial, politik, kelembagaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan membuat setiap upaya mengadopsi warisan sejarah memerlukan pembacaan yang kritis. Meski demikian, sejumlah prinsip yang berkembang pada masa Abbasiyah masih memiliki relevansi bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer.

Pelajaran pertama berkaitan dengan keterbukaan terhadap berbagai sumber pengetahuan. Perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah menunjukkan bahwa kemajuan intelektual lahir dari kesediaan menerima, mengkaji, dan mengembangkan pengetahuan yang berasal dari beragam tradisi. Karya-karya Yunani, Persia, India, dan Siria tidak dipandang sebagai ancaman terhadap identitas Islam, tetapi sebagai sumber yang dapat dipelajari, dikritisi, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Sikap seperti ini tetap relevan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Pendidikan Islam tidak cukup hanya mendorong penguasaan informasi, tetapi juga perlu membangun kemampuan literasi, berpikir kritis, serta kecakapan mengevaluasi implikasi sosial dan etis dari perkembangan ilmu pengetahuan.

Pelajaran kedua berasal dari keragaman kelembagaan yang menopang pendidikan Abbasiyah. Kemajuan ilmu tidak dihasilkan oleh satu jenis institusi, melainkan melalui hubungan yang saling melengkapi antara masjid, madrasah, perpustakaan, rumah sakit, observatorium, dan berbagai ruang belajar lainnya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan tinggi Islam pada masa kini juga memerlukan kolaborasi yang lebih luas. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran di kelas, tetapi perlu membangun keterhubungan dengan laboratorium, pusat riset, rumah sakit, lembaga sosial, industri, perpustakaan digital, serta komunitas masyarakat. Integrasi ilmu akan berkembang lebih nyata ketika proses pembelajaran dihubungkan dengan penelitian, inovasi, dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.

Aspek pembiayaan juga memberikan pelajaran yang penting. Wakaf dan patronase pada masa Abbasiyah berperan dalam menyediakan sarana pendidikan, mendukung aktivitas ilmiah, serta membantu keberlangsungan para pelajar dan pengajar. Bentuk kelembagaan tersebut tentu tidak dapat direplikasi secara langsung karena sistem hukum dan tata kelola pendidikan telah berubah. Namun, prinsip keberlanjutan pendanaan tetap relevan untuk memperkuat pengembangan pendidikan Islam. Pengelolaan dana wakaf, filantropi, maupun sumber pembiayaan lainnya perlu diarahkan pada penguatan riset, penyediaan beasiswa, pengembangan perpustakaan, publikasi ilmiah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tata kelola yang akuntabel dan profesional (Lusiana et al., 2024; Saputri, 2024).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pencarian ilmu pada masa Abbasiyah tidak dipisahkan dari pembentukan karakter dan tanggung jawab moral. Penguasaan ilmu dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan, bukan sekadar menghasilkan kemampuan akademik. Nilai tersebut tetap memiliki makna penting ketika pendidikan Islam dihadapkan pada perkembangan kecerdasan buatan, komersialisasi pendidikan, krisis lingkungan, serta meningkatnya ketimpangan akses terhadap ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, pendidikan

tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab sosial, dan kesadaran etis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan. Meski demikian, orientasi moral tidak boleh digunakan untuk membatasi pertanyaan ilmiah ataupun menggantikan proses pembuktian akademik. Etika justru berfungsi mengarahkan penggunaan ilmu sekaligus menjaga integritas proses keilmuan (Mahendra et al., 2025).

Relevansi lain tampak pada cara memaknai integrasi ilmu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi nalar *naqli* dan *aqli* pada masa Abbasiyah tidak diwujudkan melalui peleburan seluruh disiplin ilmu ke dalam satu kurikulum yang seragam, tetapi melalui hubungan antarlembaga, kerja sama para ilmuwan, budaya literasi, dan penggunaan berbagai pendekatan sesuai karakter persoalan yang dihadapi. Pemahaman ini memberikan perspektif bahwa integrasi ilmu dalam pendidikan Islam kontemporer tidak harus diwujudkan melalui penambahan mata kuliah agama pada setiap disiplin ilmu ataupun sebaliknya. Integrasi lebih bermakna ketika berbagai bidang keilmuan mampu bekerja sama dalam memahami dan menyelesaikan persoalan kemanusiaan secara komprehensif tanpa kehilangan karakter metodologis masing-masing.

Pada saat yang sama, penerapan warisan Abbasiyah memerlukan batas historis yang jelas. Pendidikan modern berkembang dalam konteks negara-bangsa, sistem akreditasi, profesi akademik, teknologi digital, serta kebutuhan pasar kerja yang berbeda dari masyarakat Abbasiyah. Oleh karena itu, pengalaman sejarah tersebut tidak dapat dijadikan model yang diterapkan secara literal. Yang dapat diadopsi adalah prinsip-prinsip dasarnya, seperti keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, penguatan budaya riset, kolaborasi antarlembaga, keberlanjutan pembiayaan, serta keseimbangan antara kompetensi ilmiah dan tanggung jawab moral. Pendekatan seperti ini memungkinkan warisan Abbasiyah tetap relevan tanpa mengabaikan perubahan konteks yang dihadapi pendidikan Islam pada masa kini.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa integrasi nalar *naqli* dan *aqli* bukan sekadar konsep normatif yang diwariskan oleh sejarah Islam klasik. Integrasi tersebut merupakan proses yang terus dibangun melalui budaya ilmiah, keterbukaan terhadap pengetahuan, serta kemampuan menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, warisan Abbasiyah lebih tepat dipahami sebagai sumber inspirasi untuk membangun ekosistem keilmuan yang inklusif, kritis, dan berkelanjutan, daripada sebagai model pendidikan yang harus direplikasi secara utuh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nalar *naqli* dan *aqli* pada masa Dinasti Abbasiyah tidak dibentuk oleh satu lembaga pendidikan ataupun kurikulum yang bersifat tunggal. Integrasi tersebut berkembang melalui ekologi pengetahuan yang ditopang oleh hubungan antara kekuasaan politik, keragaman lembaga pendidikan, gerakan penerjemahan, budaya literasi, sistem patronase dan wakaf, serta jaringan ilmuwan yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara berkelanjutan. Dalam ekosistem tersebut, ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu rasional berkembang sesuai karakter metodologinya masing-masing, tetapi tetap saling berinteraksi dalam menjawab kebutuhan keagamaan, sosial, dan perkembangan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara nalar *naqli* dan *aqli* lebih tepat dipahami sebagai koordinasi epistemologis yang menghargai keragaman metode daripada sebagai peleburan seluruh disiplin ilmu ke dalam satu sistem yang seragam.

Implikasi penelitian ini terletak pada perlunya pengembangan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan integrasi ilmu sebagai konsep normatif, tetapi juga membangun ekosistem akademik yang mendukung kolaborasi antardisiplin, penguatan budaya literasi, riset, serta jejaring kelembagaan. Pengalaman Abbasiyah menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, melainkan juga oleh keterbukaan terhadap berbagai tradisi keilmuan, keberlanjutan dukungan kelembagaan, dan terciptanya ruang dialog yang produktif. Prinsip-prinsip tersebut masih relevan sebagai landasan dalam memperkuat pendidikan Islam di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi pustaka historis yang bertumpu pada sumber-sumber sekunder. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas pembahasan melalui analisis terhadap manuskrip primer, kajian komparatif antara sistem pendidikan Abbasiyah dan dinasti Islam lainnya, atau penelitian mengenai implementasi konsep integrasi *naqli* dan *aqli* dalam kebijakan maupun praktik pendidikan Islam kontemporer. Pengembangan penelitian ke arah tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika integrasi ilmu sekaligus memperkuat relevansinya dalam pengembangan pendidikan Islam masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K. (2024). The Pillars of Trustworthiness in Qualitative Research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/J.GLMEDI.2024.100051>
- Al-Attas, S. M. N. (2023). *Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. https://books.google.com/books/about/The_Concept_of_Education_in_Islam.html?hl=id&id=wQUa0AEACAAJ
- Assayyidi, N., & Farhan, M. (2024). Pesantrenpreneurship dalam Perspektif Pendidikan Islam. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 162–171. <https://doi.org/10.30659/JPAI.6.2.162-171>
- Badriyah, K. (2025). Islamic Educational Institutions Through Waqf, Maktab, and Kuttub (Correlation of Langghar as a Space for Basic Education). *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 341–350. <https://doi.org/10.61166/KASYAFA.V2I3.15>
- Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th Edition. 552.
- Farquhar, J., Michels, N., & Robson, J. (2020). Triangulation in Industrial Qualitative Case Study Research: Widening the Scope. *Industrial Marketing Management*, 87, 160–170. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.001>
- Hasan, M. L., Hasan, M. L., & Fajar, A. H. Al. (2025). Pendidikan Islam Berbasis Masjid: Studi Literatur Atas Fungsi Masjid sebagai Institusi Edukasi. *Journal Islamic Studies*, 6(01), 116–133. <https://doi.org/10.32478/r82yx419>

- Ismail, I. (2024). Classical Islamic Education Socio-Historical Analysis of Curriculum and Its Relevance in the Contemporary Era. *Edusia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Asia*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.53754/EDUSIA.V4I1.714>
- Kamalia, S., & Imawan, D. H. (2025). Kontribusi Baitul Hikmah dalam Perkembangan Keilmuan dan Pendidikan pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 367–385. <https://doi.org/10.58518/MADINAH.V12I2.4054>
- Komariah, N. S., & Baskara, D. N. (2025). Madrasah Kuttub pada Masa Awal Umayyah Pendidikan Islam. *JISPE Journal of Islamic Primary Education*, 6(01), 60–69. <https://doi.org/10.51875/JISPE.V6I01.638>
- Kozinets, R., & Gretzel, U. (2025). Netnography and Qualitative Digital Methods to Advance Service Theory and Practice. *Journal of Service Theory and Practice*, 35(4), 487–500. <https://doi.org/10.1108/JSTP-07-2025-471>
- Lusiana, D., Irchamni, I. A., & Azizah, S. N. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Mendukung Perkembangan Industri Halal: Kajian Filantropi Islam Lazis Unisia Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(2), 132–143. <https://doi.org/10.30863/AL-TSARWAH.V7I2.8161>
- Mahendra, A. A., Defriyadi, Murtaho, A., Baharudin, & Zulhanan. (2025). Pendidikan Lingkungan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Qur’ani, Etika Ekologis, dan Peran Pendidikan Islam dalam Konservasi Alam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 266–274. <https://doi.org/10.23969/JP.V10I04.36634>
- Makdisi, George. (1981). *The Rise of Colleges. Institutions of Learning in Islam and the West*. 377.
- Makrifat, M., Santalia, I., Aderus, A., & Kurniati, Y. (2026). Reason and Revelation in Islamic Epistemology: A Hierarchical–Integrative Reconstruction. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 35–48. <https://doi.org/10.47625/FITUA.V7I1.1213>
- Mathar, Muh. Q. M. (2024). Perpustakaan Bait Al-Hikmah: Pusat Kegiatan Intelektual pada Masa Dinasti Abbasiyah. *Tumanurung: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 4(1), 1–11. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tumanurung/article/view/49991>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. *SAGE Publications, Inc*, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Nasr, S. H. (2006). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present*. <https://doi.org/10.1515/9780791481554/HTML>
- Nurhaliza, Dewi, E., & Tampubolon, A. (2025). Pemikiran Pendidikan Islam pada Masa Bani Abbasiyah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 448–473. <https://doi.org/10.23969/JP.V10I04.36571>
- Putra, B. I., Husni, H., & Wahyuni, S. (2025). The Differences in Epistemology in Islam: Traditional, Rational, And Sufistic Approaches. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(7), 2227–2233. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/1781>
- Safei, A. A. (2021). The Formula of Islamic Community Development in Indonesia Through the Social Entrepreneurship Approach. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.15575/RJSALB.V5I1.9685>
- Saputri, M. (2024). Transformasi Digital dalam Filantropi Islam: Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Melalui Fintech Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 305–314. <https://doi.org/10.61132/SANTRI.V2I6.1143>

- Shalaby, A. (2021). *Sejarah Pendidikan Islam*.
https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_Pendidikan_Islam.html?id=aZpFEAAQBAJ
- Sya'adah, M., Remiswal, R., & Khadijah, K. (2025). Evaluasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Tiga Ranah: Ranah Kognitif, Afektif, Dan Afektif. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 6(4), 859–866. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v6i4.515>
- Wasito, W. (2022). Perkembangan Madrasah sebagai Institusi Pendidikan Islam Paling Modern pada Masa Dinasti 'Abbasiyah (750-1250 M). *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 8(1), 65–85. <https://doi.org/10.53429/SPIRITUALIS.V8I1.383>
- Zuhriyah, T., Istifa, F. A., Wibowo, W., & Nailulmuna, S. S. (2024). Peran Studi Islam dalam Membangun Pemahaman Hukum Berbasis Nilai-nilai Qur'ani. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 5(3), 999–1009. <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V5I3.1889>